

UPAYA PEMERINTAH INGGRIS DAN PRANCIS DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL 2022

Yoel Andreas Saputra¹, Yayuk Anggraini²

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Abstrak

Artikel ini menganalisis kerja sama bilateral Inggris-Prancis dalam penanganan migrasi ilegal di Selat Inggris pada tahun 2022, sebagai periode kunci pasca-Brexit. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumen dan analisis kebijakan, tulisan ini menelusuri dinamika perjanjian yang relevan (Le Touquet Treaty) dan kesepakatan bilateral pasca-Brexit, serta langkah implementatif di kedua sisi perbatasan. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi, pendanaan, dan penguatan patroli menghasilkan penguatan kapasitas institusional; namun, tantangan terhadap penurunan angka penyeberangan tetap terlihat. Artikel menyimpulkan bahwa interdependensi fungsional kedua negara sebagaimana dijelaskan Keohane menjadi landasan keberlanjutan kerja sama, sembari merekomendasikan harmonisasi data dan penguatan mekanisme pengembalian yang akuntabel.

Kata Kunci: Kerja Sama Bilateral; Brexit; Le Touquet Treaty; Migrasi Ilegal; Selat Inggris

Abstract

This article examines United Kingdom-France bilateral cooperation in addressing irregular migration across the English Channel in 2022, a pivotal period after Brexit. Employing a qualitative descriptive approach via document study and policy analysis, it traces the Le Touquet Treaty, post-Brexit bilateral arrangements, and practical measures implemented on both sides of the border. The findings indicate strengthened institutional capacity through coordination, funding, and enhanced patrols, while sustained challenges to reducing crossings persist. The study concludes that functional interdependence per Keohane underpins cooperation continuity, and recommends improving data harmonisation and return mechanisms.

Keywords: Bilateral Cooperation; Brexit; Le Touquet Treaty; Irregular Migration; English Channel

1. PENDAHULUAN

Imigrasi ilegal, yakni perpindahan individu yang masuk atau tinggal di suatu negara tanpa izin resmi, telah menjadi isu global yang semakin kompleks dalam dua dekade terakhir. Kawasan Eropa Barat merupakan salah satu tujuan utama bagi para pencari suaka dan migran ekonomi yang melarikan diri dari konflik, kemiskinan, serta ketidakstabilan politik di Timur Tengah dan Afrika. Arus migrasi yang tidak terkendali ini menimbulkan tantangan besar bagi negara-negara tujuan, terutama dalam hal pengawasan perbatasan, kebijakan suaka, maupun kerja sama internasional untuk menangani imigran ilegal.

Persoalan imigrasi ilegal bersifat kompleks dan multidimensional dalam konteks hubungan internasional. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan tantangan secara administratif dan keamanan bagi negara penerima, tetapi juga berdampak pada aspek politik, sosial, dan kemanusiaan. Di satu sisi, negara tujuan berupaya menjaga stabilitas dan kedaulatan dengan mengendalikan arus imigrasi; namun di sisi lain, secara hukum internasional mereka berkewajiban memberikan perlindungan kepada para pengungsi yang melarikan diri dari kondisi krisis di negara asal.

Isu ini berdampak signifikan baik bagi negara tujuan maupun para migran itu sendiri. Bagi negara tujuan seperti Inggris dan Prancis, peningkatan arus imigran ilegal sering kali dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keamanan nasional. Beban pada layanan publik, misalnya sektor kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang turut meningkat, sementara ketegangan sosial antara komunitas lokal dan migran kerap terjadi. Di sisi lain, para migran yang menempuh jalur ilegal menghadapi risiko yang sangat tinggi, mulai dari eksploitasi oleh jaringan penyelundup manusia, kondisi kerja yang tidak manusiawi, hingga ancaman kematian selama perjalanan. Adapun contohnya seperti banyak migran yang mencoba menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil menghadapi bahaya tenggelam akibat cuaca buruk atau kapal yang tidak layak, demikian pada akhir 2021 tercatat sebuah tragedi yang menewaskan 27 orang dalam satu insiden.

Inggris dan Prancis merupakan dua aktor kunci dalam isu migrasi Eropa. Secara geografis, kedua negara hanya dipisahkan oleh Selat Inggris (English Channel) yang menjadi jalur utama penyeberangan migran dari daratan Eropa menuju Inggris. Kondisi ini menuntut keduanya menjalin kerja sama erat untuk mengendalikan arus migrasi ilegal tersebut. Hubungan bilateral di bidang keimigrasian sendiri telah terjalin sejak lama, antara lain melalui penandatanganan Perjanjian *Le Touquet* tahun 2003 yang menerapkan sistem kontrol perbatasan bersama (*juxtaposed controls*). Melalui perjanjian ini, petugas imigrasi Inggris ditempatkan di pelabuhan Prancis (seperti Calais, Dunkirk, dan Coquelles) untuk memeriksa orang dan kendaraan yang hendak menyeberang ke Inggris, dan sebaliknya petugas Prancis ditempatkan di pelabuhan Inggris. Tujuan awal perjanjian tersebut adalah memperkuat keamanan perbatasan dan mencegah penyeberangan migran ilegal.

Namun, implementasi Perjanjian *Le Touquet* menimbulkan ketimpangan tanggung jawab: Prancis menanggung beban penampungan ribuan migran di wilayahnya, sementara Inggris relatif terlindungi karena pemeriksaan imigrasi dilakukan di luar teritori Inggris. Ketimpangan ini kerap menjadi sumber ketegangan politik serta kritik bernuansa kemanusiaan di Prancis. Perspektif kedua negara terhadap isu imigrasi ilegal pun berbeda. Inggris umumnya memandang migrasi ilegal sebagai ancaman terhadap kontrol perbatasan, stabilitas sosial, dan keamanan nasional, sejalan dengan narasi politik pasca-Brexit yang menekankan kedaulatan negara serta perlindungan lapangan kerja dan sumber daya bagi warga lokal. Sebaliknya, Prancis cenderung melihat imigrasi ilegal sebagai tantangan sosial-ekonomi yang serius, terutama karena beban pada infrastruktur publik dan dampak kemanusiaan di kota-kota transit seperti Calais dan Dunkirk. Masalah ini juga memicu friksi antara pemerintah pusat dan daerah serta menjadi sumber polarisasi politik yang tajam di Prancis.

Krisis migrasi ilegal tersebut telah menciptakan kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Banyak migran yang gagal menyeberang ke Inggris tertahan di kamp-kamp sementara wilayah utara Prancis dalam keadaan jauh di bawah standar hidup layak. Para migran di kamp tersebut mengalami kekurangan pangan, minimnya akses layanan kesehatan, dan rentan menjadi korban eksploitasi jaringan penyelundup manusia. Pelaksanaan pengaturan *Le Touquet* di lapangan pun tidak lepas dari kontroversi. Di Calais, sempat terbentuk kamp pengungsi ilegal yang menampung ribuan migran berbagai negara dalam kondisi tidak layak; para migran hidup tanpa akses memadai terhadap layanan dasar dan sering kali menjadi korban kekerasan atau eksploitasi oleh penyelundup. Meskipun kamp terbesar di Calais tersebut telah dibongkar pada 2016, imigran terus berdatangan ke wilayah itu dan menimbulkan tantangan kemanusiaan baru di sekitarnya.

Persoalan imigrasi ilegal di Inggris semakin pelik setelah negara itu resmi keluar dari Uni Eropa (Brexit) pada 2020. *Brexit* membuat Inggris tidak lagi terikat pada aturan Uni Eropa seperti *Dublin Regulation* yang sebelumnya memungkinkan pengembalian pencari suaka ke negara Eropa pertama yang mereka masuki. Ketiadaan mekanisme tersebut menyebabkan Inggris mengalami lonjakan signifikan jumlah migran ilegal yang masuk, terutama melalui penyeberangan Selat Inggris

dengan perahu-perahu kecil. Inggris menjadi tujuan yang menarik bagi para migran karena kondisi ekonominya relatif lebih baik dibanding banyak negara Eropa lain, ditambah keberadaan komunitas migran yang sudah mapan di negara tersebut. Selain itu, lemahnya penegakan kebijakan imigrasi di masa lalu serta kurangnya jalur migrasi legal yang jelas dan efektif mendorong migran untuk menempuh jalur ilegal yang berbahaya.

Secara domestik, isu migrasi ilegal telah menjadi agenda politik utama baik di Inggris maupun Prancis, khususnya bagi pemerintahan berhaluan konservatif yang pasca-Brexit menjanjikan pengendalian migrasi yang lebih ketat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap maraknya migran ilegal bahkan dimanfaatkan oleh sejumlah politisi konservatif sebagai alat kampanye untuk meraih dukungan. Di Inggris, Partai Konservatif kerap menjadikan tingginya imigrasi ilegal sebagai bukti perlunya kontrol perbatasan yang kuat demi menjaga kedaulatan nasional dan keamanan domestik, sesuai janji politik mereka. Sementara itu di Prancis, kubu konservatif dan sayap kanan seperti *Rassemblement National* secara aktif mengeksploitasi sentimen anti-imigran ilegal untuk menekan pemerintah menerapkan kebijakan migrasi yang lebih keras, dengan dalih melindungi identitas nasional serta stabilitas sosial-ekonomi negara.

Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan termasuk kerangka kerja sama seperti Perjanjian *Le Touquet*, arus migran ilegal dari Prancis ke Inggris terus meningkat dan memuncak pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, sekitar 45.000 migran ilegal menyeberangi Selat Inggris dengan perahu kecil, suatu angka tertinggi dalam sejarah penanganan krisis migrasi di kawasan ini. Lonjakan tersebut sangat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya: sekitar 1.843 orang pada 2019, naik menjadi 8.466 orang pada 2020, melonjak menjadi 28.526 orang pada 2021, dan mencapai 45.774 orang pada 2022. Kenaikan tajam ini menggambarkan bahwa pasca-Brexit, Inggris menghadapi tantangan baru dalam mengendalikan arus migrasi. Tanpa kerangka kebijakan Uni Eropa yang sebelumnya memungkinkan pemulangan migran, Inggris harus bertumpu pada kerja sama bilateral dengan Prancis. Akibatnya, Prancis menanggung tekanan besar karena wilayah seperti Calais dan Dunkirk menjadi titik penampungan sementara bagi ribuan migran yang tertahan sebelum berhasil menyeberang ke Inggris.

Meningkatnya migrasi ilegal tersebut juga memicu ketegangan sosial yang tinggi, baik antara masyarakat lokal dengan para migran maupun antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang terutama di wilayah utara Prancis. Isu migrasi ini menjadi topik sensitif dalam politik domestik kedua negara dan kerap dimanfaatkan oleh kubu politik tertentu untuk memperoleh simpati publik, sehingga meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat. sehingga penelitian ini dipandang sangat mendesak untuk memberikan gambaran jelas tentang dampak sosial dan politik dari migrasi ilegal serta solusi-solusi yang dapat mengurangi ketegangan tersebut.

Selain menimbulkan krisis kemanusiaan, lonjakan imigran ilegal juga membebani perekonomian Inggris dan Prancis. Kedua negara harus mengeluarkan biaya besar untuk operasi patroli dan pengawasan, pengelolaan kamp-kamp migran, serta penegakan hukum imigrasi. Jika masalah ini tidak ditangani dengan efektif, beban finansial yang ditanggung Inggris dan Prancis akan terus meningkat dan berdampak negatif terhadap anggaran negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat. Di samping itu, imigrasi ilegal memunculkan tantangan sosial. Di Prancis, misalnya, tingginya konsentrasi migran di kota-kota seperti Calais kerap menimbulkan friksi dengan penduduk lokal. Sudut pandang hak asasi manusia juga menjadi sorotan, terutama karena kondisi penampungan para migran yang dinilai jauh dari standar kemanusiaan internasional.

Imigrasi ilegal merupakan persoalan global yang tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh satu negara. Kerja sama bilateral antara Inggris dan Prancis perlu dievaluasi secara berkala dan diperkuat dengan strategi baru yang lebih efektif, terutama dalam konteks pasca-Brexit yang telah mengubah dinamika hubungan kedua negara tersebut. Diperlukan pendekatan penanganan yang lebih holistik dan berkelanjutan, dengan memperkuat kerja sama internasional yang melibatkan banyak negara, menyediakan jalur migrasi legal yang adil, serta mengatasi akar penyebab migrasi seperti konflik, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim. Kerja sama bilateral Inggris–Prancis ke depan seharusnya tidak lagi bertumpu semata-mata pada aspek keamanan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, kewajiban hukum internasional, dan keadilan sosial. Sebuah perjanjian tidak boleh hanya berfungsi sebagai alat pengendali perbatasan, melainkan juga perlu mengedepankan pendekatan yang manusiawi terhadap para pencari suaka. Oleh sebab itu,

kesepakatan bilateral yang ada perlu diperbarui agar tidak hanya berfokus pada pengamanan, tetapi juga menyediakan mekanisme kerja sama dalam proses suaka serta perlindungan hak asasi manusia. Reformasi kebijakan bersama ini harus lebih komprehensif dan berkeadilan, selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap perjanjian bilateral, rilis kebijakan resmi, dan publikasi akademik yang relevan. Analisis data dilakukan dengan penelusuran tema (*thematic reading*) untuk memetakan tujuan, instrumen, dan implementasi kebijakan kedua negara pada tahun 2022, serta menilai keterkaitannya dengan kerangka teoritis.

KERANGKA DASAR TEORI

Konsep Kerjasama Bilateral

Sang penulis menggunakan konsep Kerjasama bilateral yang dianalisis melalui teori kerja sama internasional oleh Robert O. Keohane. Dalam sistem yang anarkis, negara tetap dapat berkoordinasi jika terdapat kepentingan bersama, informasi yang memadai, dan institusionalisasi yang mengurangi biaya transaksi. Interdependensi fungsional antara Inggris dan Prancis tercermin pada kebutuhan bersama untuk mengurangi penyeberangan berbahaya, menekan jaringan penyelundupan, dan menjaga stabilitas domestik. *Le Touquet Treaty* (2003) menyediakan basis institusional berupa juxtaposed controls, sementara kesepakatan pasca-Brexit memperkuat komando gabungan, pertukaran intelijen, dan dukungan pendanaan. Pendekatan kerja sama bilateral digunakan untuk memahami dinamika kolaborasi Inggris-Prancis dalam kasus ini, di mana interaksi kedua negara berlangsung langsung atas dasar kepentingan bersama tanpa campur tangan pihak ketiga. Bentuk kerja sama semacam ini umumnya muncul ketika suatu permasalahan lintas-batas tidak dapat diselesaikan secara sepihak, sehingga negara-negara terkait perlu berkoordinasi

satu sama lain. Dalam kerja sama bilateral, masing-masing pihak menyadari adanya saling ketergantungan: tindakan atau kebijakan satu negara berdampak langsung pada kepentingan negara lainnya. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi kebijakan yang selaras serta pembentukan mekanisme institusional, seperti satuan tugas gabungan agar upaya bersama berjalan efektif dan berkesinambungan. Hal ini tercermin dalam serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh Inggris dan Prancis untuk memperkuat pengawasan perbatasan serta menekan arus migrasi ilegal di Selat Inggris.

Konsep Rezim Internasional

Selanjutnya sang penulis juga menggunakan konsep rezim internasional turut melengkapi kerangka teori penelitian ini. Stephen D. Krasner (1983) mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang disepakati oleh para aktor dalam suatu isu tertentu. Dalam konteks hubungan Inggris-Prancis, perjanjian seperti *Le Touquet* (2003) dapat dipahami sebagai rezim bilateral yang mengatur perilaku kedua negara dalam mengelola perbatasan bersama. Walaupun hanya melibatkan dua negara, rezim ini berfungsi layaknya institusi internasional yang menjamin kesinambungan kerja sama serta kepatuhan pada aturan main bersama.

3. UPAYA PEMERINTAH INGGRIS DAN PRANCIS DALAM MENANGANI IMIGRAN ILEGAL 2022

Lonjakan Imigrasi Ilegal Tahun 2022

Tahun 2022 ditandai oleh lonjakan isu imigrasi, baik legal maupun ilegal, khususnya di Eropa Barat yakni Inggris dan Prancis. Peningkatan ini dipicu faktor geopolitik, sosial, dan ekonomi yang mendorong ribuan orang bermigrasi secara tidak sah. Salah satu pemicu utama adalah konflik dan instabilitas global, seperti perang di Ukraina yang memicu gelombang pengungsi baru ke Eropa, serta ketidakstabilan politik di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Selain itu, krisis ekonomi pasca-pandemi seperti inflasi tinggi, krisis energi, gangguan rantai pasok akibat perang yang menghantam negara-negara berkembang, mendorong migrasi demi bertahan hidup. Contohnya, negara seperti Sudan, Eritrea, Tunisia, hingga Nigeria mengalami

lonjakan harga pangan dan penurunan pendapatan, sehingga banyak warganya terdorong bermigrasi secara ilegal (Council of Europe, 2022). Data Eurostat (2023) menunjukkan pada 2022 terdapat sekitar 1,08 juta imigran ilegal/non-Uni Eropa naik 59% dibanding 2021 yang sekitar 679 ribu orang.

Upaya Bersama Inggris-Prancis dalam Menangani Imigran Ilegal

Menghadapi krisis tersebut, Inggris dan Prancis memperkuat kerja sama bilateral sebagai respons strategis. Puncaknya, pada 14 November 2022 kedua negara menandatangani *UK-France Migrant Deal 2022* yang memperbarui komitmen bersama dalam menangani migrasi ilegal. Kesepakatan senilai €72,2 juta itu bersifat pragmatis: Inggris sepakat memberikan pendanaan kepada Prancis untuk mendukung peningkatan patroli dan pengawasan di pantai utara Prancis, termasuk penggunaan teknologi deteksi canggih serta pembentukan pusat koordinasi intelijen bersama (Reuters, 2022). Sebagai imbalannya, Prancis menaikkan jumlah personel penjaga pantai hingga 40% dan memperluas operasi pencegahan terhadap aktivitas penyelundupan manusia. Oleh sebab itu, petugas perbatasan Inggris ditempatkan di ruang kendali Prancis guna memperkuat koordinasi lintas negara. Langkah-langkah tersebut mencerminkan pembagian tanggung jawab yang lebih adil dan interdependensi baru pasca-Brexit, di mana Inggris tidak lagi terikat mekanisme Uni Eropa sehingga mengandalkan perjanjian bilateral dengan Prancis. Secara keseluruhan, pendekatan bilateral ini menyatukan kepentingan kedua negara: Inggris membutuhkan pengendalian arus migran demi keamanan perbatasannya, sedangkan Prancis memperoleh dukungan finansial dan teknis untuk menegakkan kontrol di wilayahnya.

Kerja sama intensif sepanjang 2022 tersebut membuahkan beberapa hasil konkret. Dengan tambahan patroli dan koordinasi, otoritas Prancis berhasil mencegah lebih dari 30.000 upaya penyeberangan ilegal sepanjang tahun 2022 (GOV.UK, 2022). Aparat gabungan Inggris–Prancis juga membongkar 55 jaringan penyelundupan manusia yang beroperasi di sekitar Selat Inggris (DW, 2022). Capaian ini berkontribusi menahan laju migrasi ilegal, meskipun belum cukup membalik keadaan secara menyeluruh. Di akhir 2022, jumlah migran yang berhasil mencapai Inggris tetap tinggi mencapai rekor 45 ribu orang. Namun, setelah implementasi Migrant Deal 2022, tren membaik pada tahun berikutnya: 2023 mencatat sekitar

29.400 kedatangan migran ilegal via Selat yang bisa disimpulkan bahwa jumlah migran turun sekitar 35,7% dari 2022. Penurunan signifikan ini mengindikasikan efektivitas awal peningkatan patroli dan deteksi. Namun, tren tersebut tidak sepenuhnya berlanjut pada 2024 arus migran kembali naik sekitar 25% menjadi hingga 36.800 orang, meski angka ini masih sekitar 19,6% lebih rendah dibanding 2022. Data tersebut menunjukkan bahwa sementara kerja sama mampu memberi dampak jangka pendek penurunan 2023, tekanan migrasi bersifat dinamis dan dapat meningkat lagi seiring adaptasi di lapangan.

Efektivitas dan Tantangan Implementasi

Secara kuantitatif, kolaborasi upaya Inggris-Prancis di 2022 berhasil meningkatkan kapasitas pengawasan perbatasan. Otoritas Prancis, dengan dukungan Inggris, mengintersepsi sekitar 33.000 upaya penyeberangan pada 2022, naik 43% dari tahun sebelumnya (FullFact, 2023). Meski begitu, volume percobaan penyeberangan turut melonjak yang menyebabkan rasio keberhasilan pencegahan justru menurun sedikit sekitar 42,5% dari total upaya berhasil digagalkan pada 2022, turun dari 50% di 2021. Hal ini menjelaskan meskipun operasi patroli diperkuat, ribuan migran masih berhasil menyeberang; jaringan penyelundup cepat beradaptasi mencari celah baru. Pendekatan kebijakan yang sangat berfokus pada keamanan juga menuai kritik dari kalangan kemanusiaan. Peningkatan patroli dan pengetatan perbatasan tanpa diimbangi solusi lain dianggap mendorong migran mengambil rute lebih berbahaya, sehingga insiden tewas tenggelam di Selat Inggris turut meningkat. *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengecam bahwa kebijakan yang dominan represif mengabaikan kewajiban perlindungan pengungsi, hak pencari suaka, termasuk anak-anak dan korban perdagangan manusia (Human Rights Watch, 2015). Kritik ini menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan penangkalan, melainkan perlu menyentuh akar masalah migrasi seperti konflik dan kemiskinan di negara asal.

Selain pencapaian positif dan juga kritik, adapun beberapa tantangan dalam implementasi upaya kedua negara, dengan antara lain:

1. Ada nya Ketimpangan Tanggung Jawab dimana sejumlah wali kota di Prancis utara menyatakan bahwa prakarsa ini menempatkan Prancis sebagai penjaga

gerbang bagi Inggris tanpa mekanisme *burden-sharing* yang adil. Mereka mengeluhkan Inggris enggan berbagi tanggung jawab dalam menampung migran yang tertahan di Prancis (The Times, 2024). Kecemasan ini mendorong seruan agar kesepakatan bilateral dievaluasi ulang atau dilengkapi skema penyaluran migran ke Inggris secara legal dan terkoordinasi.

2. Meskipun patroli diperbanyak, jumlah penyeberangan ilegal tetap tinggi menjelang akhir 2022 dan kembali meningkat di 2024. Hal ini menunjukkan jaringan penyelundup dan migran terus beradaptasi dengan taktik baru sehingga sulit dikendalikan sepenuhnya. Penurunan di 2023 bersifat sementara dan tanpa inovasi lebih lanjut, sehingga para penyelundup menemukan cara untuk mengatasi hambatan tambahan. Tantangan ini mencerminkan sifat dinamis migrasi ilegal yang selalu berevolusi terhadap kebijakan penindakan.
3. Fokus kerja sama yang condong pada aspek keamanan dipandang mengabaikan prinsip perlindungan HAM bagi pencari suaka. Organisasi seperti *Amnesty International* dan *Human Right Watch* mengkritik minimnya perhatian pada prosedur suaka yang adil dan kondisi penampungan yang layak. Kebijakan deportasi cepat dan pencegahan ketat dikhawatirkan melanggar kewajiban internasional, terutama jika tidak diiringi jalur migrasi legal atau skema relokasi pengungsi. Kritik ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan kemanusiaan dalam menangani migrasi.
4. Terlepas dari berbagai kendala tersebut, kerja sama bilateral Inggris-Prancis tahun 2022 memberikan pelajaran penting dalam diplomasi migrasi. Di satu sisi, kemitraan ini membuktikan bahwa dua negara dapat merancang respons kolektif di luar kerangka Uni Eropa untuk menghadapi tantangan bersama. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan teori kerja sama internasional bahwa negara bersedia berkooperasi tanpa otoritas supranasional ketika ada kepentingan rasional timbal balik yang jelas (Keohane, 1984).

Inggris dan Prancis sama-sama terdorong oleh motif keamanan domestik dan tekanan politik, sehingga menemukan titik temu untuk berbagi peran dan sumber daya. Di sisi lain, efektivitas kerja sama ini masih bergantung pada evaluasi

berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan. Diperlukan strategi komprehensif jangka panjang yang melengkapi pendekatan keamanan dengan upaya menangani akar masalah migrasi dan mekanisme *burden-sharing* yang lebih adil. Dengan demikian, kerja sama Inggris-Prancis dapat lebih berorientasi pada menjaga kedaulatan dan keamanan perbatasan sekaligus menghormati prinsip kemanusiaan sehingga upaya penanganan imigrasi ilegal menjadi lebih efektif dan berkelanjutan ke depannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan juga pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Isu imigrasi ilegal lintas Selat Inggris merupakan tantangan internasional yang sangat kompleks bagi Inggris dan Prancis. Persoalan ini tidak hanya menyangkut keamanan perbatasan semata, tetapi juga aspek kemanusiaan, diplomasi bilateral, serta tekanan politik dan sosial di tingkat domestik. Pada tahun 2022, jumlah migran yang menyeberangi Selat Inggris secara ilegal melonjak drastis mencapai lebih dari 45.000 orang, rekor tertinggi yang menjadikan masalah ini krisis mendesak secara nasional di Inggris. Merespons situasi tersebut, kedua negara meningkatkan kerja sama bilateral dengan menandatangani *UK-France Migrant Deal* pada 14 November 2022.

Melalui kesepakatan tersebut, Inggris berkomitmen memberikan dana sebesar €72,2 juta kepada Prancis untuk memperkuat patroli di pantai, memasang teknologi pengawasan baru, dan membentuk pusat koordinasi intelijen bersama. Prancis di sisi lain menambah jumlah personel keamanannya di wilayah pesisir utara serta memperluas langkah-langkah pencegahan terhadap penyelundupan migran. Langkah-langkah kolaboratif ini bersifat operasional sekaligus simbolis, menandakan pembagian tanggung jawab yang lebih adil antara kedua negara di jalur migrasi tersebut. Dengan kata lain, kesepakatan 2022 mencerminkan pendekatan bilateral yang pragmatis dan adaptif dalam menghadapi krisis migran.

Secara teoretis, keberlanjutan kerja sama Inggris-Prancis ini sejalan dengan konsep *institutionalized interdependence* yang dikemukakan Robert Keohane, di mana negara-negara tetap berkooperasi demi keuntungan timbal balik secara rasional tanpa memerlukan otoritas supranasional. Dalam konteks ini, Inggris berkepentingan mengendalikan arus migrasi ilegal yang masuk, sedangkan Prancis

mendapatkan dukungan finansial dan teknis untuk memperkuat pengawasan perbatasannya. Pada akhirnya, meskipun *UK-France Migrant Deal 2022* menunjukkan komitmen politik dan langkah strategis kedua negara dalam menanggulangi migrasi ilegal, efektivitasnya masih bersifat terbatas dan bergantung pada evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, penyesuaian mekanisme kerja sama, serta peningkatan integrasi antara pendekatan keamanan dan pendekatan berbasis HAM. Dengan demikian, dibutuhkan strategi penanganan migrasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk reformasi kebijakan dan perluasan jalur migrasi legal, agar akar permasalahan dapat tersentuh dan kebijakan migrasi ke depan bisa lebih efektif serta berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- AP News. (2025). The number of migrants reaching the UK in small boats in a single day hits a 2025 high. <https://apnews.com/article/britain-migrants-small-boats-france-english-channel-e92039de5c23d3dc9ad8f16ffa86b8fc>
- BBC News. (2020). Briefing: Immigration. <http://news.files.bbc.co.uk/include/newsspec/pdfs/bbc-briefing-immigration-newsspec-26148-v1.pdf>
- BBC News. (2021). Channel migrants: Why politics is dominating the debate on migrants. <https://www.bbc.com/news/world-europe-59425542>
- BBC News. (2022). Channel migrant crossings hit record 45,000 in 2022. <https://www.bbc.com/news/uk-64123060>
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World*. Palgrave Macmillan.
- Chacón, J. M. (2016). Immigration and the bully pulpit. *Harvard Law Review Forum*, 130, 243–254.
- Cott, J. W. (2015). *Bordering, border politics and cross-border cooperation in Europe*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-18452-4_2
- DW. (2022). UK and France sign €72 million deal over Channel migrants. <https://www.dw.com/en/uk-and-france-sign-72-million-deal-over-channel-migrants/a-63746654>
- Eurostat. (2023). Immigration law enforcement in the EU: 2022 figures. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230505-2>

- Full Fact. (2023). How many people have been intercepted while attempting to cross the Channel in small boats? <https://fullfact.org/immigration/small-boat-interception-rates/>
- Goldstein, J. S., & Pevehouse, J. C. (2008). *International Relations* (8th ed.). Pearson Longman.
- GOV.UK. (2022). UK–France joint statement: Enhancing cooperation against illegal migration. <https://www.gov.uk/government/publications/next-phase-in-partnership-to-tackle-illegal-migration-and-small-boat-arrivals/uk-france-joint-statement-enhancing-co-operation-against-illegal-migration>
- GOV.UK. (2023–2025). Immigration and irregular migration statistics. <https://www.gov.uk/government/collections/immigration-statistics>
- Human Rights Watch. (2015). The Mediterranean migration crisis: Why people flee, what the EU should do. <https://www.hrw.org/report/2015/06/19/mediterranean-migration-crisis/why-people-flee-what-eu-should-do>
- International Organization for Migration. (2019). *Glossary on Migration*. Geneva: IOM. https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
- International Organization for Migration. (2022). *World Migration Report 2022*. <https://www.iom.int/wmr>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (1983). *International Regimes*. Cornell University Press.
- Lutterbeck, D. (2006). Policing migration in the Mediterranean. *Mediterranean Politics*, 11(1), 59–82.
- Moch, L. (2012). *The Encyclopedia of European Migration and Minorities*. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/encyclopedia-of-european-migration-and-minorities/france/7D25E1852EABBA50F78E4B77C5BF2CB0>
- Parliament Defence Committee. (2022). Evaluating the use of military assets in civil border operations.
- Reuters. (2022). UK to fund French border patrols in bid to stop migrant boats. <https://www.reuters.com/world/uk/uk-fund-french-border-patrols-bid-stop-migrant-boats-2022-11-14/>
- The Straits Times. (2024). Britain, France sign new deal to thwart migrant Channel crossings. <https://www.straitstimes.com/world/europe/britain-france-sign-new-deal-to-thwart-migrant-channel-crossings>

The Times. (2024). French mayors seek to rip up Channel migrants deal with UK.
<https://www.thetimes.co.uk/article/french-mayors-seek-to-rip-up-channel-migrants-deal-with-uk-ms6cqh67p>

Triandafyllidou, A. (Ed.). (2016). *Irregular Migration in Europe: Myths and Realities*.
Routledge.

UK-France Joint Statements and Agreements (2022–2023). Government of the United Kingdom.

UK Home Office. (2023). *Irregular Migration to the UK: Year Ending December 2022*.
<https://www.gov.uk/government/statistics/immigration-system-statistics-year-ending-december-2022>